

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshidiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019).
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990).
- Ibrahim, Jonny, *teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, (Malang: Benyumedia publishing, 2008).
- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Grafindo (Persada Jakarta : 2011).
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008).
- Ndraha, Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa (Cetakan Ke-3)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991).
- Novriansyah, Deny, *Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf, *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*, (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2015).
- Rosidin, Utang, *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019).
- Said, M. Mas'ud, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, (UMM Press Malang 2012).
- Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1996).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press. 2012).

Solekhan, Moch, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014).

Subakti, Ramlan, *Memahami ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, Anggota IKAPI, 1992).

Wasistono, Sadu, *Administrasi Pemerintahan Desa*, (Fokusmedia : 2009).

Widjaja, H.A.W, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945),

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018, Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan

Peraturan Walikota Semarang Nomor 17A Tahun 2012 Tentang Mekanisme
dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan Kota Semarang

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Jurnal

Arifin, Alimuddin Said, dan Andi Nuraeni Aksa,”Peran pemerintah
kelurahan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di kelurahan
Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”, Otoritas Jurnal Ilmu
pemerintahan, Vol. III No.2 ; 2013.

Budiman N. P. D. Sinaga, dan Sahat H. M. T. Sinaga, Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Yang Inkonstitusional, Masalah - Masalah Hukum,
Volume 48, No.3, 2019.

Konradus, Danggur, Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi, Masalah -
Masalah Hukum, Jilid 45 No. 3, Juli 2016.

Maarotong, Jenli, Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik,
Jurnal Ilmu Politik, Vol.2, No 6 ; 2015

Masriyani dan Herma Yanti, Fungsi Partai politik Dalam Pendidikan Politik
Bagi Masyarakat, Wajah Hukum, Vol. 3. No.97, 2019.

Saraswati, Retno, *Arah Politik Hukum Pengaturan Desa di Masa Depan
(Ius Constituendum)*, Masalah – masalah Hukum, Vol. 43. No.3, 2014.

Sulaeman, Affan, Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah,
Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1. No.1, 2015.